



OPTIMALISASI DIPLOMASI TNI ANGKATAN LAUT DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Daniel Iwan Setiawan¹⁾, Werijon²⁾, Dadang Widyanto³⁾

^{1,2,3)}Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut

Abstrak

Sebagai Negara yang memiliki posisi strategis yang terletak diantara dua benua dan dua samudera Indonesia akan menghadapi bahaya kedaulatan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Poros Maritim Dunia (PMD) adalah suatu visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang kuat. Dalam mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia maka peran Diplomasi TNI AL yang dijalankan harus dioptimalkan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil beberapa referensi dari jurnal, buku, penelitian terdahulu, berita dan beberapa aturan aturan yang berkaitan. Untuk mengoptimalkan Diplomasi TNI AL dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia diperlukan postur TNI AL ideal yang terdiri atas sejumlah Alutsista modern. Pelaksanaan Diplomasi TNI AL dibutuhkan personel yang mempunyai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga peran TNI AL dalam mendukung kebijakan Kelautan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat dilaksanakan secara optimal. Diperlukan sinergitas untuk menciptakan kesatuan persepsi dan tindakan diantara seluruh stakeholder kemaritiman untuk melaksanakan optimalisasi Diplomasi TNI AL dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kesimpulan dari penelitian ini ada tiga hal dalam pengoptimalan diplomasi maritim. yaitu pertama meningkatkan kecanggihan alutsista, kedua peningkatan SDM TNI AL dan ketiga peningkatan sinergitas.

Kata Kunci: Optimalisasi, Diplomasi, TNI AL, Poros Maritim Dunia

*Correspondence Address : danieliwanstwn@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v9i1.2022.151-159

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang memiliki posisi strategis yang terletak diantara dua benua dan dua samudera Indonesia akan menghadapi bahaya kedaulatan, sudah seharusnya Indonesia memiliki diplomasi TNI AL yang kuat apabila terjadi konflik dengan negara tetangga. Hal ini diperlukan bukan hanya untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim bagi seluruh kapal Indonesia maupun kapal – kapal negara lain yang berlayar di perairan Indonesia dari pembajakan, perompakan dan bahaya navigasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Poros Maritim Dunia (PMD) adalah suatu visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Visi besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan diri sebagai PMD ditopang oleh beberapa pilar utama yang diatur dalam Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI). Melalui konsep PMD agenda pembangunan nasional akan difokuskan pada pilar-pilar utama yang salah satunya adalah penerapan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menanganai sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan. Penerapan diplomasi maritim ini harus didukung oleh beberapa stake holder kemaritiman.

TNI Angkatan Laut (TNI AL) merupakan salah satu diantara stake holder tersebut yang secara tradisional mempunyai peran dalam bidang Diplomasi (Booth, 1997).

Teori peran universal angkatan laut menyatakan bahwa, secara tradisional angkatan laut memiliki tiga peran, yaitu peran militer, diplomasi dan constabulary (Booth, 1997). Peran diplomasi tersebut diadakan karena melaksanakan tujuan politik negara. Penjelasan ini mempertegas pendapat bahwa pembentukan angkatan laut secara kualitatif harus mampu melaksanakan peran universal tersebut. Apabila angkatan laut telah mampu memenuhi tuntutan tugas sesuai peran universal dalam mengamankan kepentingan nasional di dalam maupun luar kawasan, maka secara kualitas dapat dikatakan angkatan laut tersebut telah berkelas dunia (Supandi, 2017). Angkatan laut kelas dunia memiliki karakter unggul yang harus selalu ditampilkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Karakter unggul tersebut meliputi keunggulan SDM, Keunggulan organisasi, Keunggulan kemampuan operasional, serta keunggulan teknologi.

Dalam mendukung Kebijakan Kelautan Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017, maka peran Diplomasi TNI AL yang dijalankan oleh TNI AL harus dioptimalkan. Dalam melaksanakan peran Diplomasi TNI AL, Marsetyo berpendapat bahwa Angkatan Laut suatu negara harus memiliki karakter unggul yang harus selalu ditampilkan secara konsisten dari waktu ke waktu yang meliputi keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM), keunggulan organisasi, keunggulan kemampuan operasional,

serta keunggulan teknologi (Marsetio 2014).

Dikaitkan dengan kondisi saat ini, untuk melaksanakan diplomasi maritim secara optimal TNI AL memiliki keterbatasan dalam bidang SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, alutsista yang digunakan juga masih terbatas dalam hal jumlah dan teknologi. Akibatnya, keunggulan kemampuan operasional serta keunggulan teknologi tidak dapat diwujudkan. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah banyaknya stakeholder kemaritiman di Indonesia yang mencapai tiga belas institusi dengan dasar hukum, aturan, tugas dan wewenang masing-masing. Agar dapat melaksanakan diplomasi TNI AL secara optimal, diperlukan sinergitas yang solid antara TNI AL dengan berbagai institusi tersebut. Kondisi yang diharapkan tersebut adalah alutsista berteknologi modern dalam jumlahnya ideal untuk mendukung tugas dan peran Angkatan Laut, SDM unggul untuk mengawaki organisasi dan alutsista modern serta terwujudnya sinergitas antar stakeholder kemaritiman di Indonesia.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Pemerintah, TNI AL mengambil langkah – langkah dengan upaya yang dilakukan yaitu mengoptimalkan Diplomasi TNI AL sesuai dengan Kepres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Teori Peran Angkatan Laut, Teori Diplomasi Maritim, Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teori Sinergitas. Oleh sebab itu penelitian ini berjudul optimalisasi diplomasi TNI angkatan laut dalam mendukung kebijakan kelautan pemerintah untuk mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan

penelitian dimana data yang nanti disajikan lebih banyak dalam bentuk kata-kata dibandingkan dalam bentuk angka. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dimana data diambil dari jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, literatur dan berita dari situs-situs resmi.

Sebagai dasar bahan analisis penulis menggunakan beberapa landasan pemikiran berupa peraturan perundang – undangan, Kepres Presiden tentang Kebijakan Kelautan serta Teori yang memiliki korelasi atau relevansi terkait pembahasan dalam penulisan ini. Disamping itu sebagai referensi perpustakaan digunakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan

HASIL DAN PEMBAHASAN

TNI AL secara teoritis maupun faktual memiliki peran sentral dalam pelaksanaan diplomasi maritim dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai PMD. Secara universal Angkatan Laut negara berdaulat memiliki peran dalam bidang diplomasi. Sementara secara faktual, TNI AL telah berperan aktif dalam pelaksanaan Diplomasi Maritim Kooperatif antara lain melalui penyelenggaraan kerjasama, latihan dan operasi bersama negara lain; pelaksanaan Diplomasi Maritim Persuasif antara lain melalui partisipasi dalam misi kemanusiaan, misi perdamaian dan muhibah; serta pelaksanaan diplomasi Koersif antara lain melalui pengusiran dan penenggelaman kapal pencuri ikan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia (Rijal, 2013).

Prioritas dan fokus pengembangan alutsista menuju terwujudnya postur TNI AL diarahkan pada perwujudan Kekuatan Pokok Minimum/ Minimum Essential Force (MEF), namun dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan Postur Ideal

TNI AL yang telah direncanakan dalam jangka panjang. Standar Kekuatan Pokok Minimum ditentukan dengan mempertimbangkan secara holistik dan komprehensif ukuran minimum kekuatan satuan operasional untuk menangani ancaman aktual dalam jangka pendek maupun ancaman potensial dalam jangka panjang. Prioritas pertama perwujudan Kekuatan Pokok Minimum adalah peningkatan kemampuan mobilitas TNI AL untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI AL di seluruh wilayah nasional.

Prioritas Kekuatan Pokok Minimum selanjutnya adalah pada peningkatan kemampuan satuan tempur khususnya pasukan pemukul (*striking force*) baik satuan di tingkat pusat maupun satuan di wilayah, serta penyiapan pasukan siaga (*standby force*) terutama untuk penanganan bencana alam serta tugas-tugas misi perdamaian dunia, termasuk diplomasi maritim. Perwujudan Kekuatan Pokok Minimum akan dipenuhi secara bertahap sehingga diharapkan Kekuatan Pokok Minimum dapat dijadikan sebagai pijakan dasar menuju kekuatan Alutsista TNI AL yang ideal guna mendukung terwujudnya diplomasi maritim yang kuat.

Alutsista memiliki peranan penting dalam mendukung diplomasi TNI AL dalam rangka mewujudkan PMD. Untuk itu diperlukan postur TNI Angkatan Laut dengan kekuatan alutsista yang dapat mendukung kepentingan nasional dan kebijakan negara serta mempengaruhi kebijakan negara lain. Permasalahan yang dihadapi pada saat ini adalah kekuatan TNI AL yang baru mencapai 61% dari Postur yang dikehendaki dalam MEF. Ini dianggap belum cukup mumpuni untuk mendukung diplomasi maritim secara efektif, sehingga perlu ditingkatkan atau diperkuat. Saat ini prosentase pencapaian target MEF tersebut baru mencapai 68,72%.

Diplomasi Maritim dijabarkan sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan aset kelautan baik sipil maupun militer, termasuk Angkatan Laut, untuk memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional (Perpres, 2017). Menurut penelitian Indriati Kusumawardani, dalam sejarah Indonesia sebagai negara berdaulat telah berhasil melaksanakan Diplomasi Maritim sejak Deklarasi Djuanda 1957 dengan hasil Konsep Negara Kepulauan dan lahirnya norma hukum baru, yaitu lebar laut teritorial 12 mil laut yang diakui dalam UNCLOS 1982. Kali ini, dengan ditetapkannya kebijakan kelautan Indonesia untuk mewujudkan PMD, maka diplomasi maritim yang dalam konteks ini dilaksanakan oleh TNI AL melalui diplomasi TNI AL dituntut untuk mampu memberikan hasil positif bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan penjelasan mengenai kondisi diplomasi TNI AL saat ini, diketahui bahwa TNI AL mempunyai keterbatasan alutsista dan SDM serta kurangnya sinergi dengan stakeholder maritim lainnya sehingga penyelenggaraan diplomasi TNI AL belum optimal. Kondisi saat ini yang belum optimal tersebut menimbulkan implikasi-implikasi sebagai berikut:

- a. Implikasi terhadap dukungan bagi kebijakan kelautan pemerintah
 - 1) Apabila alutsista pendukung diplomasi TNI AL tidak dipenuhi, maka dukungan terhadap kebijakan kelautan pemerintah kurang maksimal.
 - 2) Apabila Sumber Daya Manusia pengawak TNI AL dalam melaksanakan diplomasi maritim tidak terpenuhi, maka dukungan terhadap

- kebijakan kelautan pemerintah kurang maksimal.
- 3) Apabila sinergitas dengan stakeholder kemaritiman dan Kerjasama Luar Negeri dalam penyelenggaraan diplomasi TNI AL tidak terwujud, maka kebijakan kelautan pemerintah kurang maksimal.
- b. Implikasi terhadap terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Apabila kebijakan kelautan pemerintah tidak terdukung, dengan lemahnya Diplomasi Maritim maka Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia tidak terwujud.

Kebijakan merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar suatu strategi-strategi yang digunakan untuk menjawab masalah yang diturunkan menjadi pokok persoalan. Kebijakan dirumuskan menggunakan *policy formulation analysis* memanfaatkan peluang dan mengeliminasi kendala yang ada dan memperhatikan indikasi keberhasilan. Strategi adalah penjabaran dari kebijakan yang ditentukan berupa rumusan tujuan (*ends*), cara (*ways*), dengan sumber daya (*means*) yang ada. Strategi disusun untuk mencapai tujuan sesuai dengan indikasi keberhasilan, memanfaatkan peluang dan mengeliminasi kendala dengan cara-cara tertentu dan peralatan/fasilitas yang memungkinkan dan sesuai. Sedangkan upaya adalah cara atau tindakan nyata dari masing-masing strategi, berisi siapa yang berbuat (*subjek*), terhadap apa (*objek/sasaran*), dengan cara apa (*metode*). Upaya merupakan implementasi strategi dengan memanfaatkan peluang dan mengeliminasi kendala oleh subjek

dalam penelitian dengan cara-cara tertentu dan peralatan/fasilitas yang memungkinkan dan sesuai.

Dihadapkan dengan beberapa permasalahan, peluang dan kendala yang merupakan hasil identifikasi pokok-pokok permasalahan, maka analisis dilakukan dengan menggunakan landasan pemikiran sehingga dapat diidentifikasi dan dirumuskan kerangka kebijakan, strategi dan upaya yang komprehensif untuk dapat mensinergikan berbagai komponen atau elemen yang terkait dalam mengoptimalkan diplomasi maritim. Kebijakan tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui strategi dan upaya-upaya yang menjadi instrumen pendorong dalam pemecahan masalah dan hambatan yang ada. Untuk itu maka dirumuskanlah suatu kebijakan yang mempunyai formulasi sebagai berikut, yaitu: "Terwujudnya optimalisasi diplomasi TNI AL melalui pemenuhan kebutuhan alutsista TNI AL, pemenuhan kebutuhan SDM TNI AL serta sinergitas TNI AL dengan stakeholder kemaritiman lainnya, guna mendukung Kebijakan Kelautan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia."

Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI AL yang tangguh dan modern bagi pelaksanaan diplomasi TNI AL melalui perencanaan, pengadaan, pengawasan, koordinasi dan kerjasama, riset dan pengembangan serta evaluasi guna mendukung kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
- b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan SDM TNI AL bagi pelaksanaan diplomasi

maritim. melalui rekrutmen, pendidikan dan latihan guna mendukung kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

- c. Mewujudkan sinergitas TNI AL dengan stakeholder kemaritiman lainnya bagi pelaksanaan diplomasi maritim, melalui koordinasi, kerjasama, Focus Group Discussion, regulasi, studi banding, muhibah, dan pertukaran informasi guna mendukung kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI AL adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan

- a) TNI AL melaksanakan perencanaan kebutuhan pengadaan alutsista secara bottom up melalui operational requirement yang disusun berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan operasi guna mendukung diplomasi maritim dan kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
- b) TNI AL melaksanakan perencanaan dalam hal penganggaran pengadaan alutsista berdasarkan operational requirement yang disusun oleh Sopsal dengan mengedepankan asas prioritas, guna mendukung diplomasi

maritim dan kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

- c) TNI AL melaksanakan perencanaan pengadaan alutsista melalui penentuan spesifikasi teknis (Spektek) yang disusun operational requirement yang disusun oleh Sopsal, guna mendukung diplomasi maritim dan kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

2) Pengadaan

- a) TNI AL melaksanakan pengadaan alutsista KRI dan Pesud, guna mendukung diplomasi maritim dan kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
- b) Dinas Persenjataan dan Elektronika Angkatan Laut (Dispenlekal) mendukung pengadaan alutsista dengan melaksanakan bimbingan teknis bidang Persenjataan dan Elektrikal/kelistrikan pengadaan alutsista, guna mendukung diplomasi maritim dan kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

- c) Dinas Komunikasi dan Elektronka Angkatan Laut (Diskomlekal) mendukung pengadaan alutsista dengan melaksanakan bimbingan teknis bidang Komunikasi dan Elektronika dalam pengadaan alutsista, guna mendukung diplomasi TNI AL dan kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
- 3) Pengawasan
- a) Itjenal melaksanakan pengawasan dalam fungsi inspektorat pada pelaksanaan pengadaan alutsista KRI, guna mendukung diplomasi maritim dan kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
 - b) Disoplatal melaksanakan pengawasan dalam fungsi asistensi pada pelaksanaan pengadaan alutsista, guna mendukung diplomasi maritim dan kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
- 4) Koordinasi dan Kerjasama
- a) TNI AL melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan dalam mendukung percepatan pengadaan Alutsista guna memenuhi kebutuhan Alutsista TNI AL dalam mendukung diplomasi TNI AL, guna mendukung diplomasi maritim dan kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
 - b) TNI AL melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan industri pertahanan dalam negeri dalam mendukung percepatan pengadaan Alutsista guna memenuhi kebutuhan Alutsista TNI AL dalam mendukung diplomasi TNI AL, guna mendukung diplomasi maritim dan kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
- 5) Riset dan Pengembangan (RnD)
- a) TNI AL melaksanakan Penelitian dan Pengembangan guna mendukung pengadaan alutsista dalam mewujudkan memenuhi kebutuhan Alutsista dalam mendukung diplomasi TNI AL, guna mendukung diplomasi maritim dan kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia
 - b) TNI AL melaksanakan kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan lembaga atau institusi Litbang lain guna mendukung pengadaan alutsista dalam

mewujudkan postur TNI AL yang dikehendaki dalam mendukung diplomasi maritim, memenuhi kebutuhan Alutsista TNI AL dalam mendukung diplomasi TNI AL, guna mendukung diplomasi maritim dan kebijakan kelautan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

6) Evaluasi

- a) TNI AL menunjuk Tim Evaluasi Spektek untuk Pengadaan Alutsista yang memerlukan validasi Spektek.
- b) TNI AL melaksanakan evaluasi spesifikasi teknis dihadapkan pada perkembangan teknologi dan kesesuaian dengan Operational Requirement;
- c) TNI AL melaksanakan analisa terhadap kemungkinan penggunaan produk dalam negeri; dan
- d) membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Spesifikasi Teknis.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan SDM TNI AL melalui recruitment, pendidikan, dan latihan. Sedangkan upaya dalam mendukung sinergitas, yaitu dengan memperhatikan koordinasi dan komunikasi untuk membangun sikap saling percaya antara pihak-pihak yang terkait. Selain itu, upaya ini juga merupakan implementasi dari diplomasi maritim kooperatif dalam rangka soft maritime diplomacy seperti dijelaskan dalam teori diplomasi maritim

KESIMPULAN

Untuk mengoptimalkan Diplomasi TNI AL dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia diperlukan postur TNI AL ideal yang terdiri atas sejumlah Alutsista modern. Sebagai komponen pertahanan yang bersifat technological heavy, kekuatan TNI AL ditentukan oleh Alutsista yang canggih dan modern untuk menimbulkan pengaruh kewibawaan dan efek deterrence di kancah internasional yang mampu mendukung kebijakan pemerintah RI dan kepentingan nasional. Disisi lain, Alutsista tersebut diperlukan untuk mempengaruhi bahkan menekan kebijakan negara lain agar selaras atau minimal tidak merugikan kepentingan nasional RI.

Pelaksanaan Diplomasi TNI AL dibutuhkan personel yang mempunyai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga peran TNI AL dalam mendukung kebijakan Kelautan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat dilaksanakan secara optimal.

Tata kelola kemaritiman di Indonesia melibatkan banyak stakeholder dengan tugas, kewenangan dan aturan masing-masing. Oleh karena itu diperlukan sinergi untuk menciptakan kesatuan persepsi dan tindakan diantara seluruh stakeholder kemaritiman untuk melaksanakan optimalisasi Diplomasi TNI AL dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

DAFTAR PUSTAKA

Booth, Ken. 1997. *Navies and Foreign Policy*. London: Croom Helm.

Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia, Lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017, 32.

Kusumawardani, Indriati. nd. *Kebijakan Kelautan Indonesia*. 254-255.

Marsetio. 2014. *Manajemen Strategis Negara Maritim Dalam Perspektif Ekonomi Dan Pertahanan*. makalah ilmiah Program Pasca Sarjana STIMA IMMI Jakarta.

Marsetio. 2014. *TNI AL Berkelas Dunia: Paradigma Baru*. Jakarta: Markas Besar TNI AL.

Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 9.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

Rijal, Khairul, Najamuddin. 2013. Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. *Jurnal Global dan Strategis*, Nomor 1, 2013, 69-72

Supandi, Ade. 2015. Pembangunan Kekuatan TN IAL Dlaam Rangka Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pertahanan* Volume 5, Nomor 1, Agustus 2015, 14.

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 9c